



Konsep Perencanaan dan Penganggaran



Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Konsep dan Sistem Perencanaan

KB 1



Paradigma Pembangunan



1. Paradigma pertumbuhan ekonomi
2. Paradigma pembangunan sosial
3. Paradigma ekonomi-politik
4. Paradigma pembangunan manusia

Perencanaan yang rasional



1. Tujuan harus jelas
2. Alokasikan sumberdaya jelas
3. Penggunaan sumberdaya efisiensi
4. Informasi dan data akurat

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hasil Perencanaan Pembangunan Nasional



1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
3. Rencana Pembangunan Tahunan

Ilustrasi Perencanaan



Visi



Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah/organisasi dalam jangka panjang.

Misi



Misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai

Tujuan



Merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran



Menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur

Kinerja



adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur

Target



Hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang dari suatu program/kegiatan pada tahapan atau kurun waktu tertentu.

Cakupan Perencanaan Nasional Jangka Menengah



1. Perencanaan Jangka Menengah Nasional
2. Perencanaan Jangka Menengah Daerah
3. Perencanaan Jangka Menengah Kementerian Negara/Lembaga
4. Perencanaan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Konsep dan Sistem Penganggaran

KB 2



Penyesuaian anggaran belanja



- a. perubahan asumsi makro
- b. perubahan target pendapatan negara
- c. perubahan prioritas belanja negara
- d. penggunaan saldo anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya

Dasar alokasi anggaran pada tiap-tiap kementerian/lembaga



- a. perkiraan perekonomian makro tahun yang akan datang
- b. proyeksi baseline
- c. kelangsungan program dan kegiatan tahun jamak
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- e. *new initiative*
- f. Potensi sumber-sumber pembiayaan

Penetapan Pagu Indikatif



- a. Angka Prakiraan Maju
- b. *resource envelope*
- c. Pengukuran kapasitas fiskal
- d. Arahan/Direktif Presiden
- e. Hasil Sidang Kabinet dan Komitmen Pemerintah
- f. Hasil Evaluasi Kinerja Penganggaran

Tujuan Trilateral Meeting



- a. Menjamin konsistensi RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja
- b. Menyempurnakan Rancangan Awal RKP tahun rencana
- c. Menyusun rancangan Renja K/L
- d. Membahas program dan kegiatan belanja

Pertimbangan Penyusunan Anggaran Belanja



- a. keterbatasan sumber-sumber keuangan negara
- b. manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat
- c. peraturan perundangan yang mengatur Belanja Negara
- d. membutuhkan proses yang panjang, administratif, maupun politik
- e. melibatkan banyak pemangku kepentingan

Klasifikasi Anggaran

KB 3

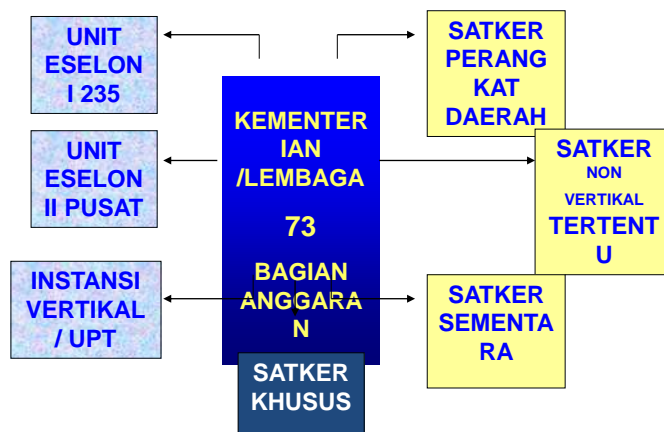


Klasifikasi Anggaran



- Klasifikasi Organisasi
- Klasifikasi Fungsional
- Klasifikasi Ekonomi/Obyek

KLASIFIKASI ORGANISASI



Klasifikasi Menurut Fungsi



1. Pelayanan Umum
2. **Pertahanan**
3. Hukum, Keterlibatan, dan Keamanan
4. Ekonomi
5. Lingkungan Hidup
6. Perumahan dan Pemukiman
7. Kesehatan
8. Pariwisata dan **Budaya**
9. Agama
10. **Pendidikan**
11. Perlindungan sosial

KLASIFIKASI EKONOMI



1. **Belanja Pegawai**
2. **Belanja Barang**
3. **Belanja Modal**
4. Bunga
5. **Subsidi**
6. Hibah
7. **Bantuan Sosial**
8. Belanja Lain-Lain



**Konsep Pendekatan
Penganggaran Berbasis
Kinerja**

Penganggaran Berbasis Kinerja



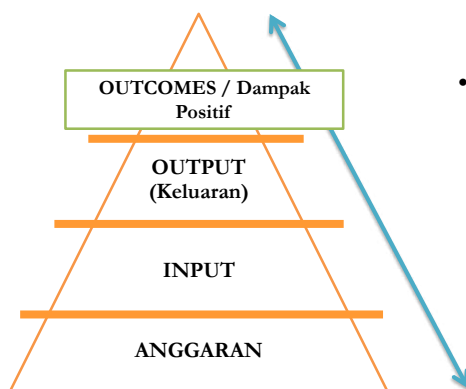
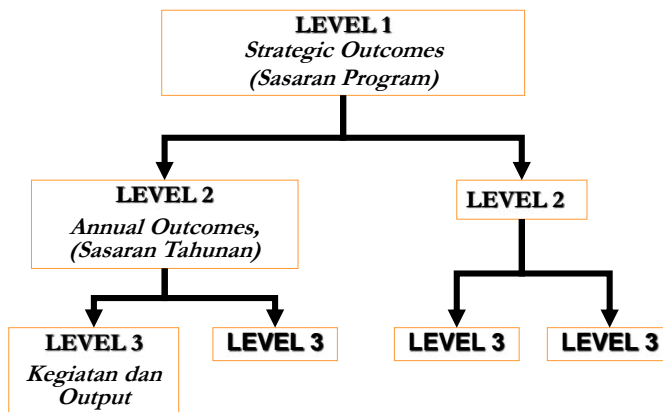
- ▶ Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome)
- ▶ Berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai
- ▶ Terdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade)
- ▶ Terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program

DEFINISI



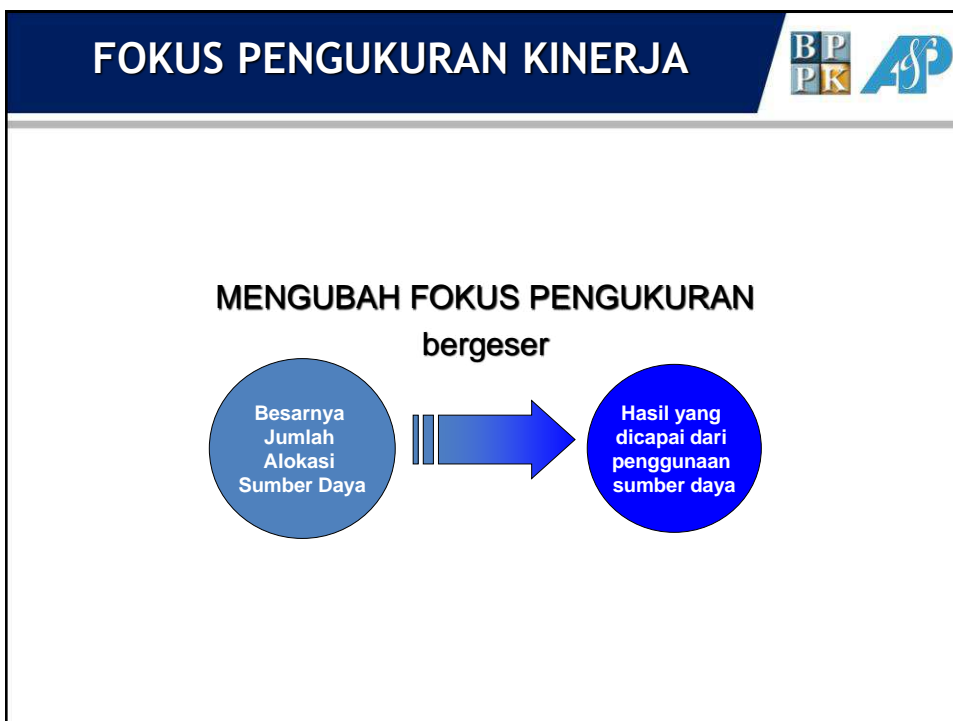
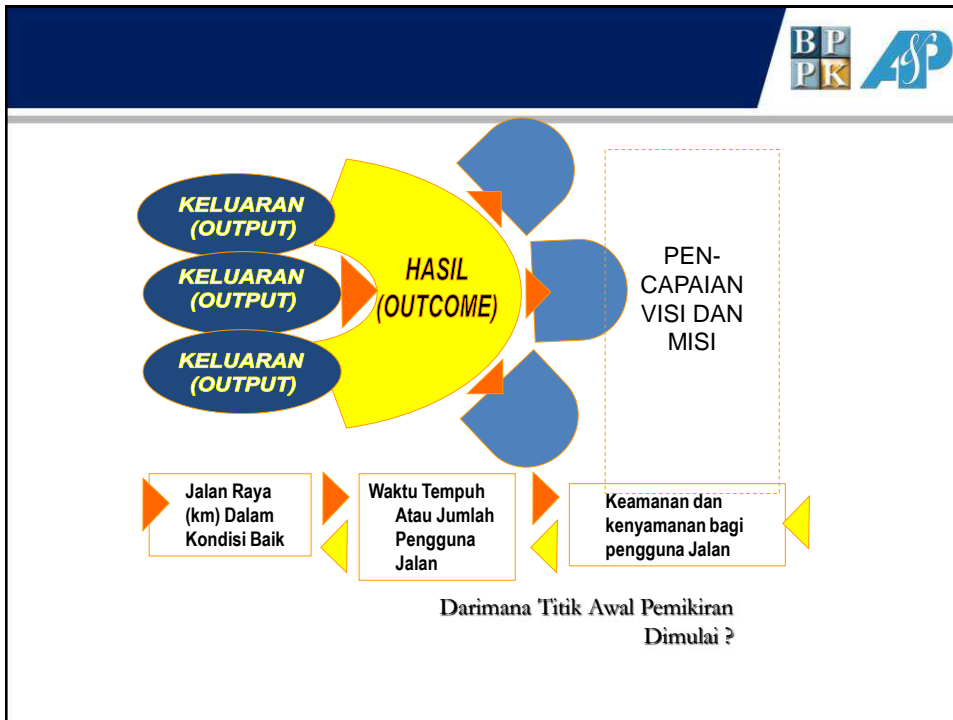
Kegiatan (*activities*) yang dibiayai anggaran akan menghasilkan **Keluaran (Output)**, dan pada akhirnya kombinasi dari berbagai keluaran kegiatan tersebut dalam suatu program diharapkan menghasilkan **Dampak Positif Program (Outcomes)**

Ilustrasi Pencapaian Sasaran Kebijakan Dalam Anggaran Berbasis Kinerja



Kebijakan Dasar :

- Bagaimana Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran



Pengukuran Kinerja



- ▶ Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (*gap*) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan
- ▶ Dengan diketahuinya perbedaan (*gap*) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan

Indikator Kinerja



- ▶ Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
- ▶ Indikator kinerja dikategorikan ke dalam kelompok :
 - masukan (*input*)
 - keluaran (*output*)
 - hasil (*outcomes*)
 - manfaat (*benefit*)
- ▶ Indikator Kinerja pada sisi penggunaan sumber daya adalah penetapan standar biaya dengan tingkat efisiensi yang maksimal
- ▶ Kinerja yang relatif lebih baik dapat diindikasikan dengan **pencapaian target output/outcomes yang sama dengan tingkat penggunaan sumber daya yang lebih minimal** dalam suatu kurun waktu tertentu

Indikator Kinerja



- ▶ Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi).
- ▶ Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja.
- ▶ Macam Indikator Kinerja:
 - Indikator Kinerja Kegiatan
 - Indikator Kinerja Program
 - Indikator Efisiensi
 - Indikator Kualitas

KRITERIA PENETAPAN TARGET KINERJA



- ▶ **Spesifik (*Specific*)**
 - *Jelas, Singkat dan Tepat Sasaran*
- ▶ **Terukur (*Measureable*)**
 - *Sebaiknya dapat dikuantifikasi*
- ▶ **Realistis (*Achievable*)**
 - *Praktis dan Masuk Akal*
- ▶ **Relevan (*Relevant*)**
 - *Merupakan kebutuhan aktual*
- ▶ **Jangka Waktu Pencapaian (*Time Frame*)**
 - *Memiliki rentang waktu kebijakan yang spesifik untuk pencapaian target*

Konsep Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)



Apakah yang dimaksud dengan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Medium Term Expenditure Framework (MTEF)



... adalah proses penyusunan anggaran yang memproyeksikan **apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan berapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan proyeksi output tersebut, dalam kondisi keterbatasan sumber daya (*budget constraint*) tertentu...**

Tujuan dan Manfaat Penerapan KPJM



- a. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (*allocative efficiency*);
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (*to improve quality of planning*);
- c. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (*best policy option*);
- d. Meningkatkan disiplin fiskal (*fiscal discipline*); dan
- e. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Landasan Konseptual KPJM



- a. Penerapan sistem *rolling budget* tidak *zero based budgeting*;
- b. Mempunyai *Baseline* (angka dasar);
- c. Penetapan Parameter;
- d. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar; dan
- e. Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaran bagi kebijakan baru (*additional budget for new initiatives*).



Pada prinsipnya, KPJM terdiri atas:

- **Estimasi Top - Down**, mengenai ketersediaan sumber daya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas Makro-Fiskal
- **Estimasi Bottom - Up**, mengenai kebutuhan biaya untuk kebijakan pengeluaran, baik kebijakan yang ada saat ini, maupun yang kebijakan baru di masa mendatang
- **Target Kinerja / Sasaran Kebijakan** kebijakan anggaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran
- **Kerangka Kerja (framework)** yang menggambarkan rekonsiliasi antara kebutuhan pendanaan anggaran dengan ketersediaan sumber daya (*aggregate resources*)

KPJM

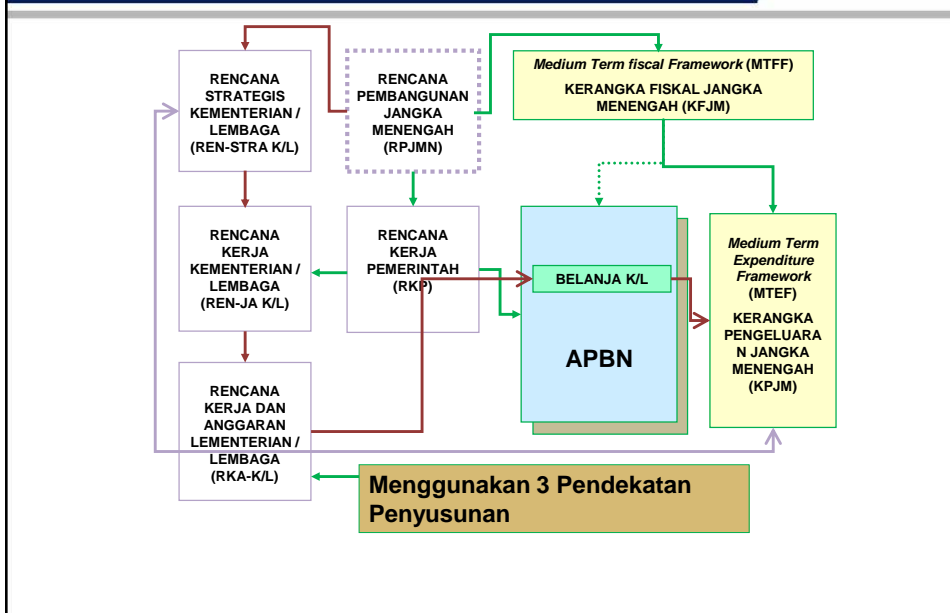


...ADALAH SUATU PROSES BERGULIR DAN BERKESINAMBUNGAN YANG MEMBANTU PEMERINTAH UNTUK MENDISIPLINKAN PENGELUARANNYA DAN FOKUS PADA UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET YANG TELAH DIGARISKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN, BAIK DALAM JANGKA MENENGAH MAUPUN DALAM JANGKA PENDEK

...ADALAH STRATEGI DALAM KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH YANG BERLANDASKAN KEPADA:

1. Efektivitas Pemilihan Kebijakan (*Analisis Opportunity Cost*)
2. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan (*Analisis Cost Efficiency*)
3. Fokus Pada Pencapaian Target Tugas Pokok & Fungsi
4. Penciptaan Sinergi Antara Level Kebijakan Strategis, Unit Perencanaan Penganggaran dan Unit Pelaksana Kebijakan
5. Konsistensi Kebijakan dan Implementasi Strategi

SINKRONISASI DALAM SISTEM PENGANGGARAN



Penganggaran Terpadu *Unified Budget*



PENGANGGARAN TERPADU

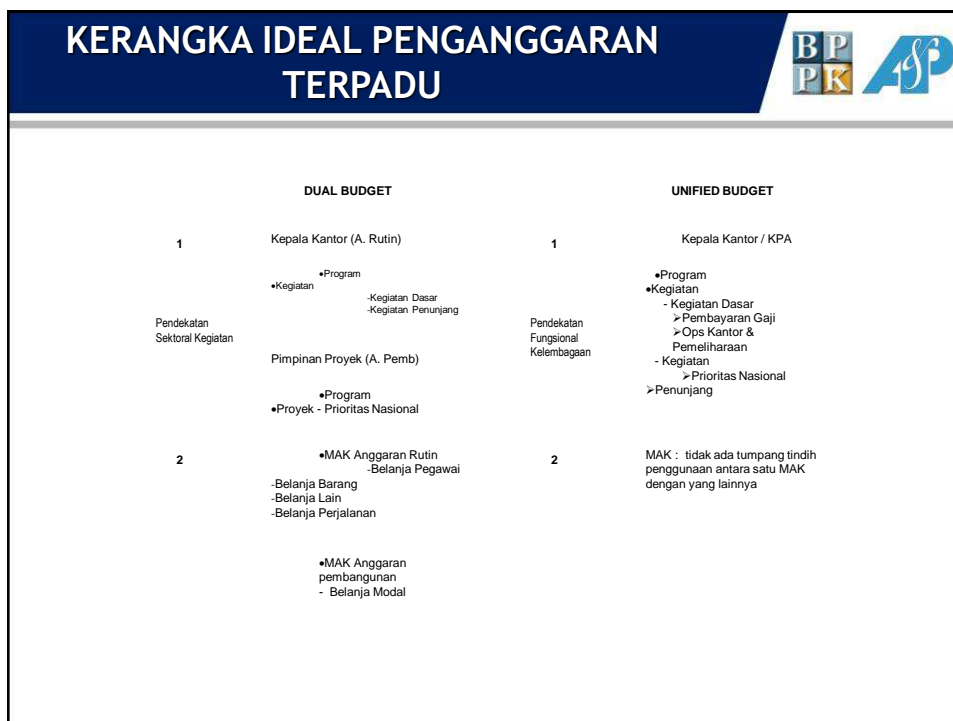
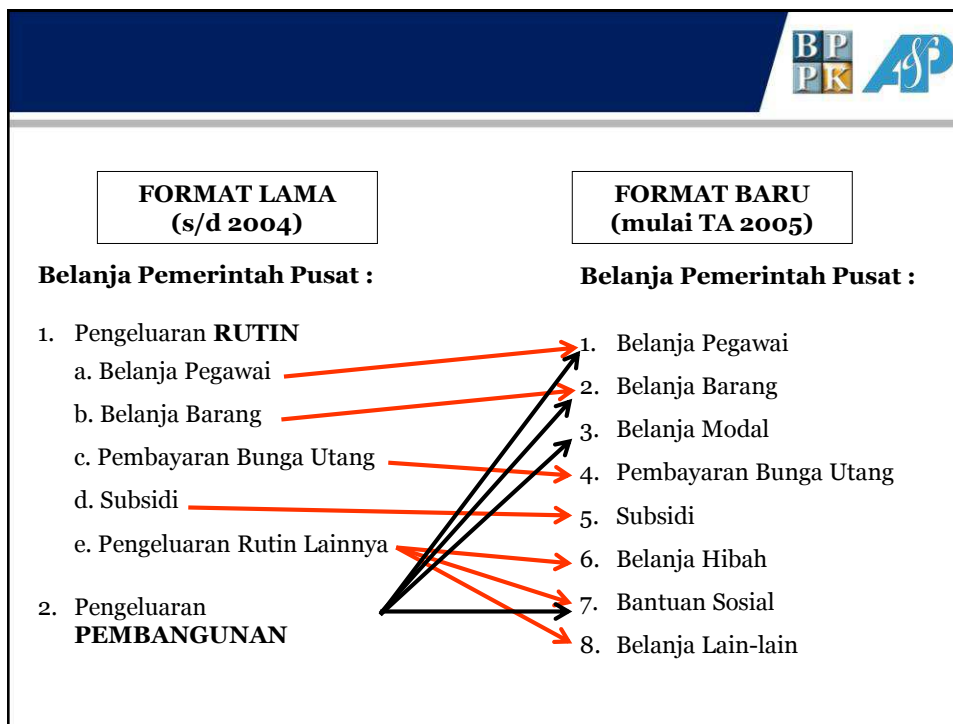


1. Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
2. Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (*recurrent*) dipertimbangkan secara simultan.
Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.
3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terintegrasi / terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional dan target prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat

Penganggaran Terpadu



- ▶ Keterpaduan pengelola kegiatan
- ▶ Keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan
- ▶ Keterpaduan antar program/ kegiatan sesuai fungsi dari suatu kementerian
- ▶ Keterpaduan program / kegiatan antar kementerian negara/lembaga
- ▶ Keterpaduan program/kegiatan baik antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat



Implementasi Perencanaan dan Penganggaran pada Satuan Kerja

KB 3



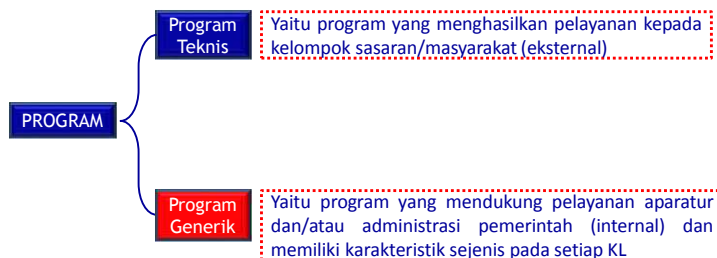
A. KONSEP DASAR



RKAKL merupakan “Rencana Keuangan”, maka mekanisme penyusunan/input RKAKL mencakup:

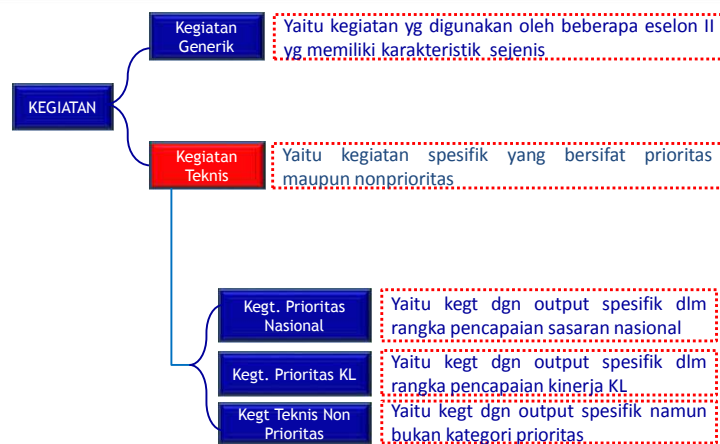
- Rencana Belanja
- Rencana/Target Pendapatan
- Rencana Kinerja

B. RENCANA BELANJA

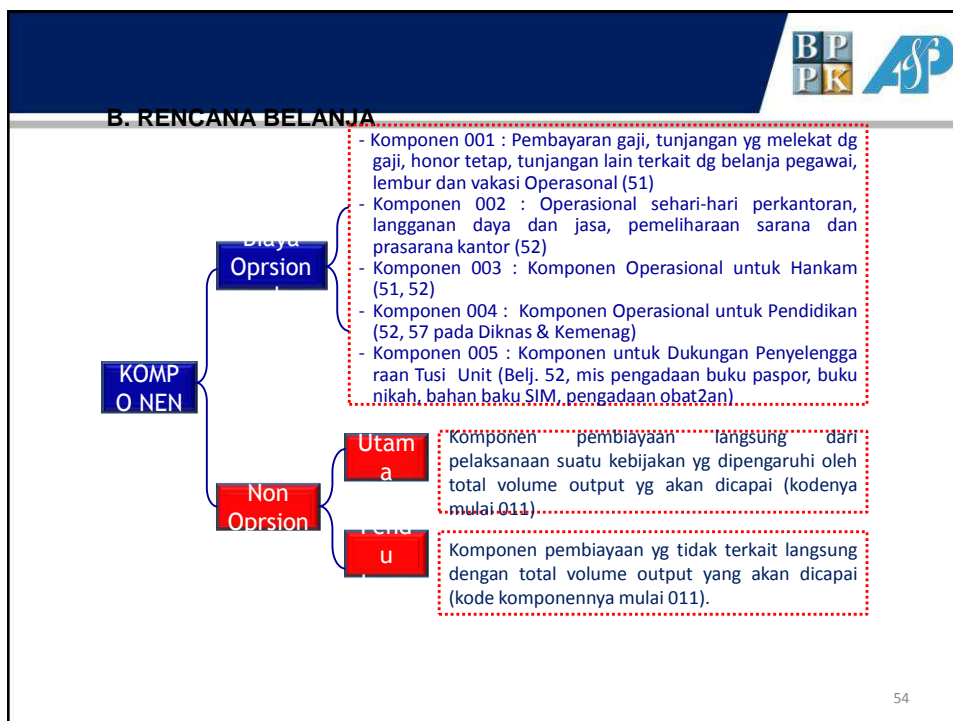
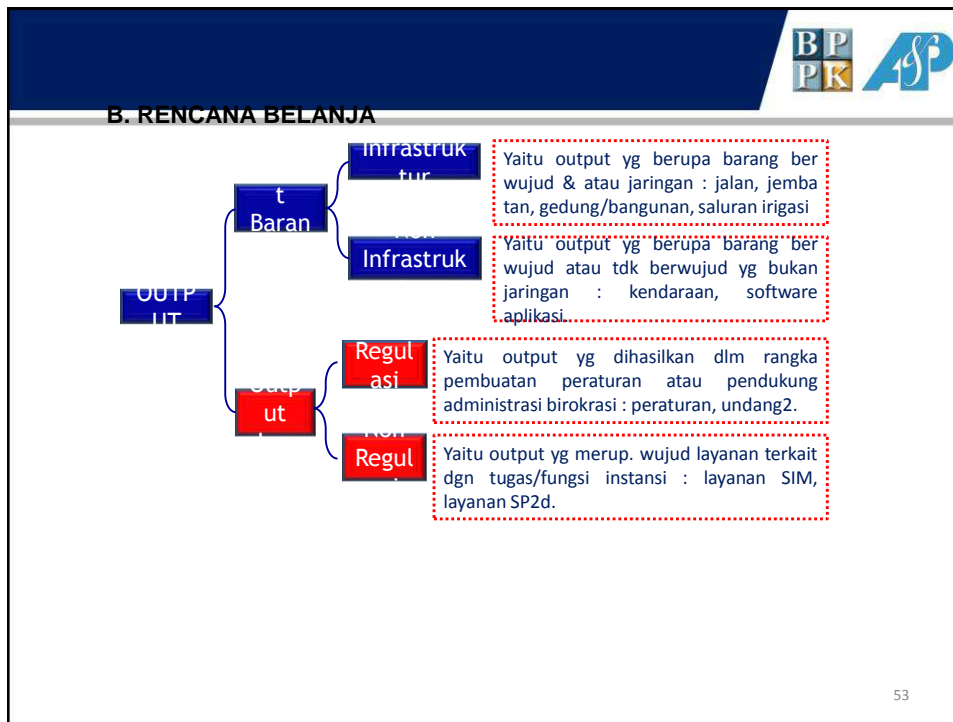


51

B. RENCANA BELANJA



52



B. RENCANA BELANJA



Akun belanja terbagi dalam jenis belanja:

- 51 Belanja Pegawai
- 52 Belanja Barang
- 53 Belanja Modal
- 54 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
- 55 Belanja Subsidi
- 56 Belanja Hibah
- 57 Belanja Bantuan Sosial
- 58 Belanja Lain-lain

55

C. TARGET PENDAPATAN



- Tidak semua satker mempunyai pos penerimaan, sehingga pengisian target pendapatan lebih ditujukan pada satker yang mempunyai penerimaan.
- Data target pendapatan, tercantum pada dokumen "RKA Satker Bagian C" dan "RKA Satker Bagian D"

56

D. RENCANA KINERJA



- Rencana kinerja pada RKAKL mencakup “apa yang menjadi target” dan “berapa target atau volume yang hendak dicapai”.
- Informasi “apa yang menjadi target” tercantum pada dokumen RenjaKL, yang kemudian informasi ini “diteruskan” ke RKAKL
- Sedang informasi “berapa target yang akan dicapai” suatu satker, tercantum pada RKAKL
- Rencana/target kinerja ada di level Output
- Data target kinerja, tercantum pada dokumen “RKA Satker Bagian A”

57

E. DOKUMEN RKAKL



KK Satker

KK Satker merupakan “Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran Direncanakan” sampai dengan level detail.

RKA Satker

Terdiri atas:

- Bagian A – memuat Rencana Kinerja Satker
- Bagian B – memuat Rincian Belanja Satker (sampai dengan level Komponen)
- Bagian C – memuat Target Pendapatan Satker
- Bagian D – memuat Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satker Tahun Anggaran t+1, t+2, t+3.

Merupakan akumulasi seluruh RKA Satker

RKAKL

Terdiri atas:

- **Formulir 1** – memuat Rencana Pencapaian Strategis Pada KL (ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran).
- **Formulir 2** – memuat Rencana Pencapaian Outcome Unit Eselon 1 (ditandatangani oleh Eselon I/Penanggung Jawab);
- **Formulir 3** – memuat Rincian Biaya Pencapaian Outcome Unit Eselon 1 (ditandatangani oleh Pejabat Eselon I **dan untuk RKAKL berdasarkan Alokasi Anggaran KL ditambahkan tanda tangan persetujuan Komisi di DPR**).

58

KAK/TOR dan RAB



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR)



merupakan dokumen yg memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai OUTPUT yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan, berisi penjelasan/keterangan mengenai apa (what), mengapa (why), siapa (who), kapan (when), di mana (where), bagaimana (how), dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan/output.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)



- adalah suatu dokumen yang berisi rincian komponen-komponen input dari sebuah kegiatan/output serta besaran biaya dari masing-masing komponen, penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam KAK/TOR.

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)



- *Gender Budget Statement (GBS)* merupakan RAB untuk Output yang berkenaan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG). GBS yang telah disusun disampaikan kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.



Terima Kasih

Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

